

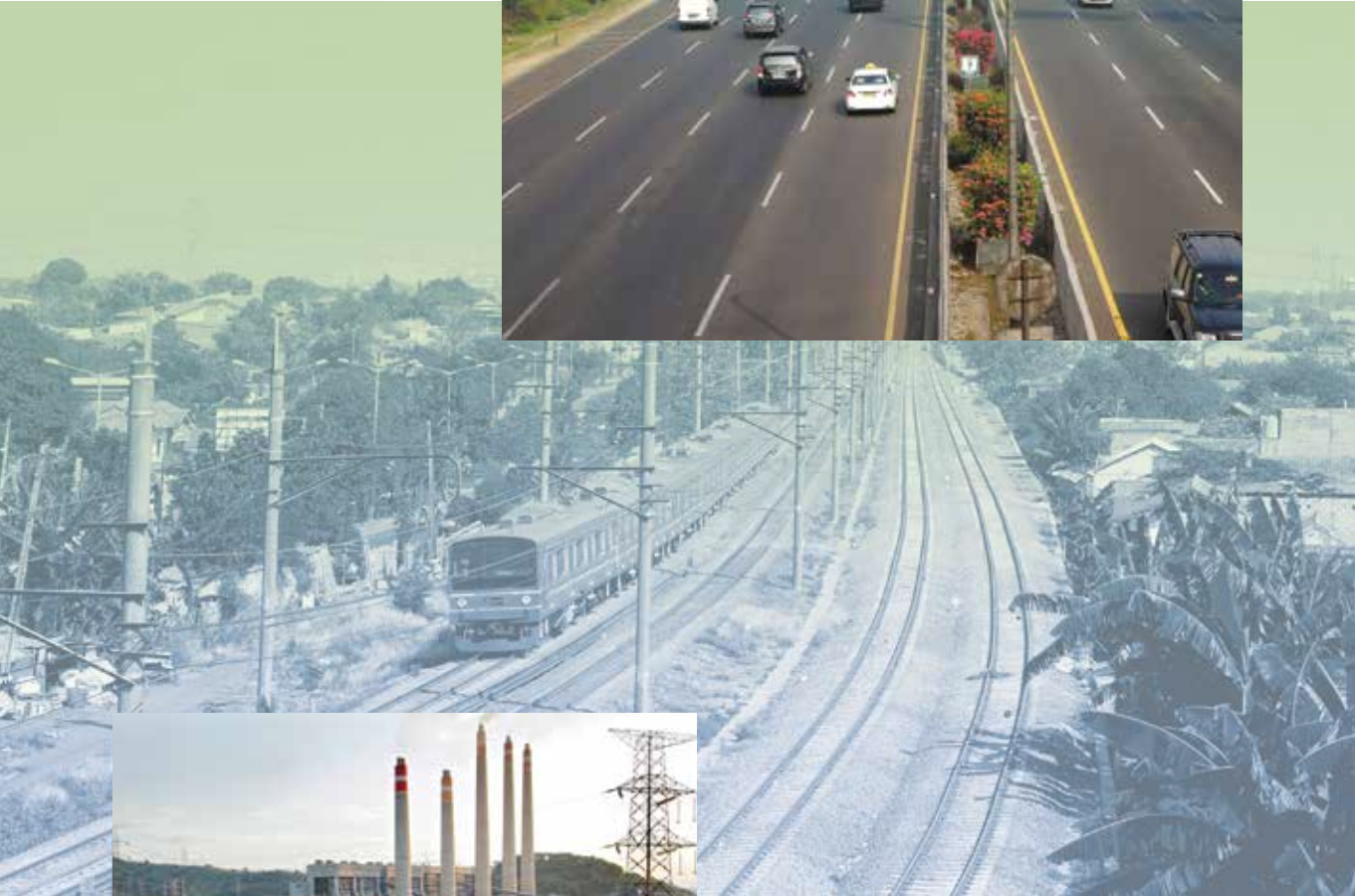


IIGF | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

GUARANTEERING INDONESIA'S INFRASTRUCTURE



COMPANY PROFILE



DAFTAR ISI

- 1 Tentang PT PII**
Tinjauan Bisnis
Visi, Misi dan Tujuan
Kerangka Regulasi
- 2 Pendukung Proyek Infrastruktur Indonesia**
Manfaat
Kriteria Kelayakan Penjaminan
Kebijakan Satu Pelaksana
Model Bisnis
- 3 Cakupan dan Kapasitas Penjaminan**
Cakupan Risiko
Kapasitas Penjaminan

TABLE OF CONTENTS

- 1 About IIGF**
Business Overview
Vision, Mission, and Objectives
Regulatory Framework
- 2 Support for Indonesia's Infrastructure Project**
Value Propositions
Eligibility Criteria
Single Window Policy
Business Model
- 3 Coverage and Capacity**
Risk Coverage
Guarantee Capacity

1

TENTANG PT PII ABOUT IIGF



Tinjauan Bisnis

Seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia terdorong untuk menyiapkan dukungan fiskal dan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta dalam skala besar. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pemerintah telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, yakni, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai layanan Satu Pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

PT PII dirancang untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel. Hal ini dilakukan melalui tata kelola perusahaan yang baik, yang mampu meminimalisir campur tangan politik serta memiliki standar transparansi dan independensi yang sangat tinggi.

Business Overview

The increasing demand for infrastructure development to support economic growth has led Indonesian Government to provide fiscal support and a better framework in attracting private investment and participation in a large scale. To satisfy this demand, the Government has established a new State Owned Enterprise (SOE) namely, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as a Single Window for appraising, structuring, and providing guarantees for Public Private Partnership (PPP) infrastructure projects.

IIGF is designed to be a credible guarantee provider. This will be ensured through a robust governance structure minimizing any risks of political interference and very high standards of transparency and independence.

PT PII dikembangkan mengacu kepada berbagai pengalaman internasional yang menggunakan penjaminan Pemerintah untuk menarik pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur. Beberapa lembaga internasional, antara lain, Bank Dunia, turut memberikan dukungan teknis dalam penyusunan tata cara evaluasi (*appraisal*), tata kelola perusahaan dan fungsi penting lainnya di PT PII.

PT PII diharapkan dapat menarik institusi finansial sejenis, untuk bermitra dalam penyediaan dan peningkatan kapasitas penjaminan.

IIGF is developed based on relevant international experiences involving the use of Government guarantees to leverage private financing for infrastructure development. Several international institutions, amongst other, The World Bank, have provided technical assistance in the development of the appraisal procedures, corporate governance, and other critical functions IIGF possesses.

IIGF is expected to attract similar financial institutions to partner with in providing guarantees and expanding guarantee capacity.



Visi

Menjadi satu-satunya penyedia penjaminan yang memiliki peran penting dalam menarik partisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Misi

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
- Menjalankan kebijakan "Satu Pelaksana" dalam proses pemberian jaminan, dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
- Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.

Tujuan

- Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPBU melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan yang jelas dan konsisten.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
- Memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJKP (Kementerian, BUMN, Pemda) dengan penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang terstruktur baik.
- Memagari kewajiban kontinjen Pemerintah dan meminimalisir guncangan terhadap APBN.

Vision

To be the sole guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private participation for infrastructure development, to accelerate Indonesia's economic growth.

Mission

- *To provide guarantee products through transparent and robust business processes.*
- *To implement Single Window policy in guarantee provision through solid capital base and professional management.*
- *To improve the creditworthiness of Indonesia's infrastructure projects.*

Purpose

- *To improve creditworthiness and quality of infrastructure PPPs by establishing clear and consistent appraisal and claim frameworks for guarantees.*
- *To improve the governance and transparency on guarantee provisions.*
- *To facilitate the deal flow for Contracting Agencies (i.e., Ministries, SOEs, Regional Governments) by providing guarantees to well-structured PPPs.*
- *To protect Government's contingent liability and minimize the impact to the State Budget.*

2

DUKUNGAN UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR INDONESIA *SUPPORT FOR INDONESIA'S INFRASTRUCTURE PROJECT*

Manfaat

Penjaminan yang diberikan PT PII diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

INDONESIA

- Mendukung pembangunan ekonomi melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek infrastruktur berkualitas.
- Mengurangi biaya infrastruktur dengan beban bunga pinjaman yang lebih rendah, sehingga dapat menekan tarif yang dibayarkan masyarakat.
- Melindungi Pemerintah dari klaim yang tak terduga dan risiko terhadap kewajiban finansial proyek infrastruktur yang timbul akibat penjaminan yang diberikan.
- Mendorong atau menstimulasi langkah Pemerintah selanjutnya dalam implementasi KPBU.



PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)

- Menarik minat swasta dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek menjadi lebih tinggi dan sesuai jadwal.
- Meningkatkan kompetisi dalam proses *tender* untuk mendapatkan penawaran berkualitas dan harga yang kompetitif.

SEKTOR SWASTA

- Mengurangi atau mitigasi risiko yang sulit ditangani oleh sektor swasta.
- Meningkatkan transparansi, kejelasan, dan kepastian dalam proses penyediaan penjaminan.
- Meningkatkan *bankability* proyek.
- Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang dapat berpengaruh pada penawaran harga yang lebih kompetitif.
- Mendorong PJPK untuk membuat kontrak sesuai praktek terbaik yang berlaku umum, dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.



Value Proposition

IIGF's guarantees and their subsequent effects will help:

INDONESIA

- Support economic development through PPPs that provide quality infrastructure projects.
- Reduce infrastructure costs through lower interest rate, thus reducing the tariff borne by end users.
- Protect the Government from unexpected claims and risk exposures to infrastructure-financing liability arising from guarantees.
- Encourage/stimulate further Government action on PPPs.

PRIVATE SECTOR

- Mitigate risks that are difficult for private sector to cover through other means.
- Improve transparency, clarity, and certainty of guarantee provision processes.
- Improve project bankability.
- Lengthen financing maturities, hence it can improve competitiveness of bid price.
- Drive CAs to prepare contracts that comply with best practices commonly applied and fulfill obligations under cooperation agreement.

CONTRACTING AGENCIES (CA)

- Attract private investors and financial institutions to participate in PPP projects, hence it can increase the success rate of the project execution in accordance with the plan and schedule.
- Bring more competition into the tender process, hence improving the quality of tender proposal and get more competitive price.

Kriteria Umum Penjaminan

Proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII adalah proyek yang menggunakan skema KPBU, sesuai Peraturan Presiden No. 38/2015.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 78/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010, proyek tersebut harus, diantaranya, memenuhi kelayakan teknis dan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait.

Terdapat **19** sektor yang dapat diberikan penjaminan
There are 19 sectors eligible for guarantee



Transportasi
Transportation



Jalan
Roads



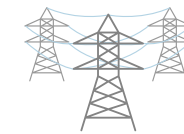
Sumber daya air dan irigasi
Water resources and irrigation



Sistem pengelolaan persampahan
Waste management system



Telekomunikasi dan informatika
Telecommunications and informations



Ketenagalistrikan
Electricity



Fasilitas pendidikan
Educational facilities



Sarana dan prasarana olahraga serta kesenian
Sports and arts facilities



Kawasan Regional
Regional

Eligibility Criteria

Infrastructure projects that can be guaranteed by IIGF must be Public Private Partnership projects complying with Presidential Regulation No. 38/2015.

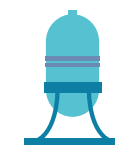
As stipulated in the Presidential Regulation No. 78/2010 and Minister of Finance Regulation No. 260/2010, the projects must, among others, be technically and financially feasible, and be in compliance with regulations related to their respective sectors.



Air minum
Clean water



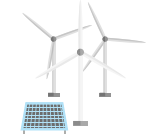
Sistem pengelolaan air limbah terpusat
Central waste water system



Sistem pengelolaan air limbah setempat
Local waste water system



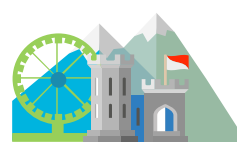
Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
Oil and gas, and renewable energy



Konservasi energi
Energy conservation



Fasilitas perkotaan
Urban facilities



Pariwisata
Tourism



Kesehatan
Health care



Lembaga pasyarakatan
Correctional facilities



Perumahan rakyat
Public housing

Kebijakan Satu Pelaksana

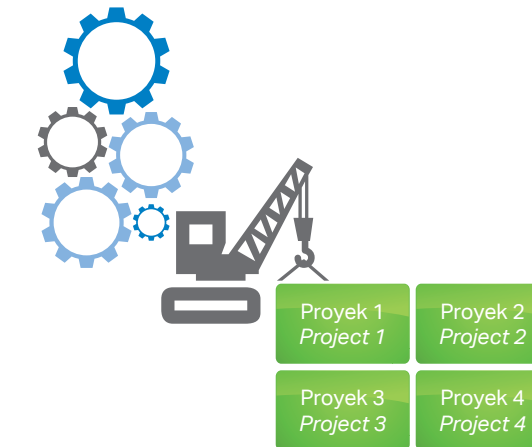
PT PII berperan menjalankan Kebijakan Satu Pelaksana atau *Single Window Policy* dari Pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi proyek infrastruktur, menstruktur penjaminan dan memproses klaim.

Dalam Kebijakan Satu Pelaksana ini, Pemerintah menugaskan PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk melaksanakan proses penjaminan, guna mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam proses pemberian penjaminan dan pengelolaan klaim, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Single Window Policy

IIGF serves as Indonesian Government's single window for appraising infrastructure projects, structuring the guarantees, and processing claims.

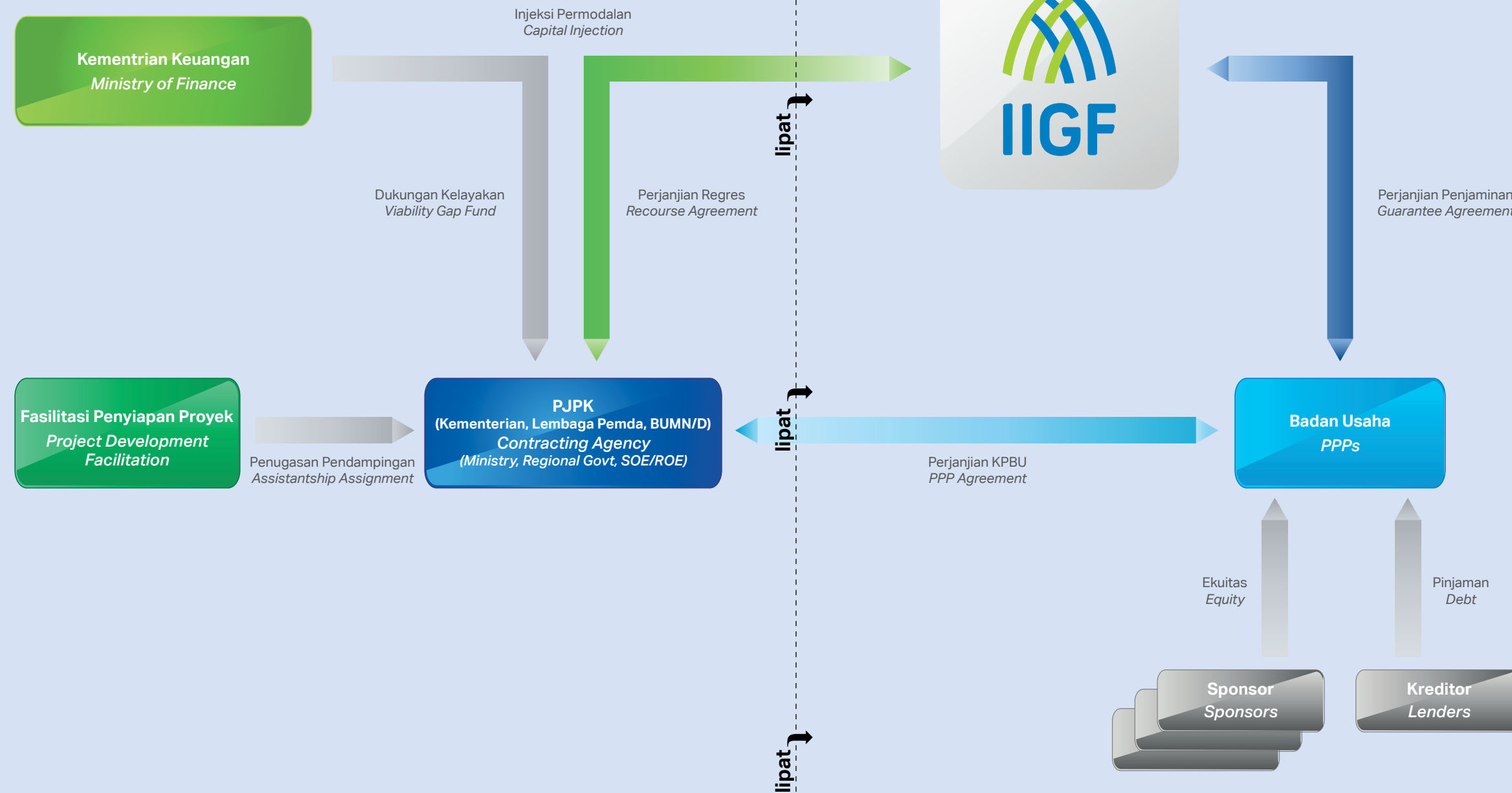
In this Single Window Policy, the Government mandates IIGF as the Infrastructure Guarantee Entity to conduct the guarantee provision process, to uphold transparency and consistency in the guarantee provision and claim management, in order to increase investors' confidence to participate in infrastructure projects in Indonesia.



Mengevaluasi, Menstruktur Penjaminan dan Memproses Klaim
Appraising, Structuring of Guarantees and Processing Claims

Model Bisnis

Model bisnis PT PII dirancang untuk menjadikan proses penyediaan penjaminan konsisten, transparan, dan efisien.



Business Model

IIGF's business model is designed to make the guarantee provision process consistent, transparent, and efficient.

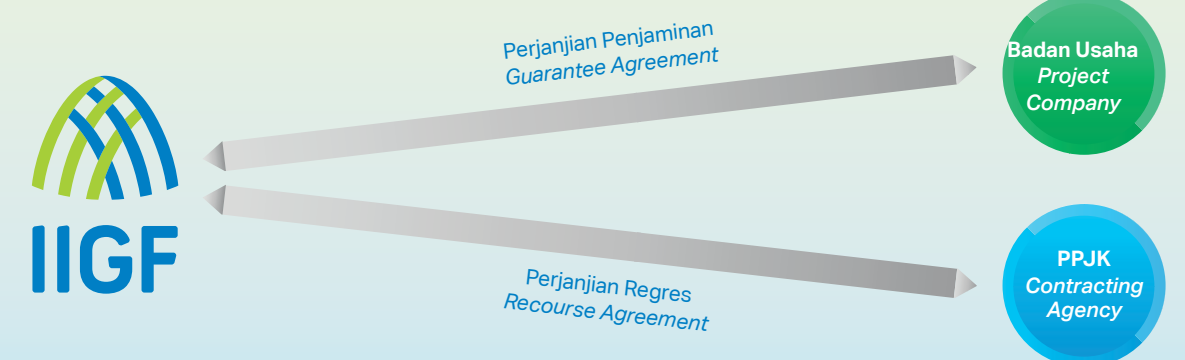
Penjaminan yang diberikan PT PII secara khusus disiapkan untuk mendukung komitmen terkait kewajiban finansial dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Perjanjian Regres antara PT PII dan PJK dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan kondisi finansial PT PII dan meningkatkan disiplin, serta akuntabilitas PJK dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya yang telah disepakati dalam kontrak KPBU.

IIGF Guarantees are designed to specifically back the commitments related to financial obligations of the Contracting Agency (CA) in PPP Contracts.

Recourse Agreement between IIGF and CA is meant to ensure IIGF's financial sustainability, improve and discipline, as well as an accountability of CA to fulfill its financial obligations agreed on in the PPP contract.

Hubungan Kontraktual (Contractual Relationship)



Kewajiban Pembayaran (Payment Obligation)



3

CAKUPAN DAN KAPASITAS UNTUK PENJAMINAN COVERAGE AND CAPACITY FOR GUARANTEE

Cakupan Risiko

Ruang lingkup penjaminan PT PII adalah kewajiban finansial PJKP, sesuai Perjanjian Kerjasama yang didasarkan pada alokasi risiko yang wajar.

PT PII dapat menjamin berbagai kewajiban finansial PJKP yang telah dialokasikan kepada PJKP sesuai perjanjian KPBU.

Risk Coverage

IIGF's scope of guarantees will be the CA's financial obligations under the PPP contract, which is based on a proper risk allocation.

IIGF may guarantee CA's various financial obligations that have been allocated to the CA in accordance with the PPP agreement.

Contoh-contoh risiko yang dapat dijamin:

Lisensi izin dan persetujuan

Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin, atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan).

Keterlambatan/kegagalan *financial close*

Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan *financial close* yang diakibatkan tindakan/tidak bertindaknya PJKP (selain isu lahan dan isu perijinan).

Perubahan regulasi dan perundangan

Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya.

Examples of risks that can be guaranteed:

Licenses, permits, and approvals

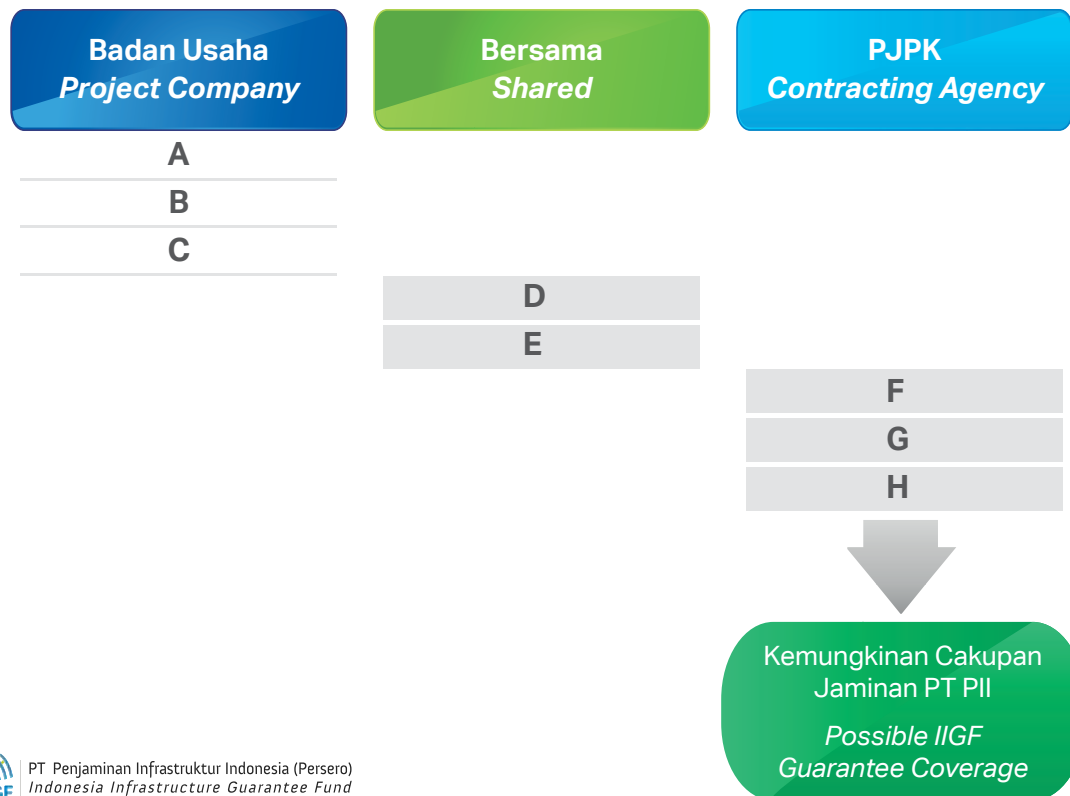
Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).

Financial close delay/failure

Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/permits/approvals).

Change in law/regulations

Coverage for impact of change in law/regulation in the event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications which results in changes in costs.



Kapasitas Penjaminan

Dalam menstruktur penjaminan, PT PII memiliki akses penjaminan dari:

- Modal PT PII
- Lembaga Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia atau institusi terkait lainnya
- Pemerintah Indonesia, sebagai penjamin bersama

Guarantee Capacity

In structuring a guarantee product, IIGF will have access to the balance sheets of:

- *IIGF Capital*
- *Multilateral Development Agencies such as The World Bank, or other relevant institutions*
- *The Government of Indonesia, as Co-Guarantor*



Kapasitas Keuangan

Pemerintah telah menanamkan modal ke PT PII melalui APBN. Selanjutnya, PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungannya pada APBN dengan meningkatkan kapasitas penjaminan, melalui kerjasama dengan institusi lembaga multilateral atau bilateral.

Kemampuan Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan

PT PII telah menempatkan para profesional terpilih yang berasal dari berbagai latar belakang ilmu dan profesi untuk mengisi posisi manajemen dan posisi-posisi strategis lainnya. Kemampuan manajemen dan tata kelola perusahaan PT PII senantiasa meningkat, seiring kemitraannya dengan lembaga-lembaga terkait yang kredibel, seperti Bank Dunia dalam mengembangkan struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan prosedur pengoperasian (*operations manual*) berdasarkan praktek terbaik internasional.



Financial Capacity

The Government has injected capital to IIGF from the State Budget. Over time, IIGF may reduce its dependency on the State Budget and will increase its guarantee capacity through various cooperations with multilateral or bilateral financial institutions.

Management Capacity and Corporate Governance

IIGF has placed competitively-selected professionals from various backgrounds in senior management and other key positions. IIGF's management capacity and corporate governance is continuously being strengthened through its partnership with credible and relevant organizations, such as the World Bank in developing a world-class corporate governance structure and operations manual based on international best practices.





Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia

www.iigf.co.id

T +62 21 5795 0550
F +62 21 5795 0040
info@iigf.co.id

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund